

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

Jl. Hos Cokroaminoto No.1 Ungaran
Telp. (024) 6921127, FAX (024) 6921004

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	4
2.1	Kebijakan Keuangan	4
2.2	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB III	IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	13
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	13
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	23
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	27
	Kebijakan akuntansi Pemda	27
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	37
	PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	37
5.1	Pendapatan	37
5.1.1	Pendapatan Asli Daerah	37
5.2	Belanja	37
5.2.1	Belanja Operasi	37
5.2.1.1	Belanja Pegawai	38
	Belanja Tak Langsung	38
	Belanja Langsung	38
5.2.1.2	Belanja Barang/ Jasa	38
5.2.2	Belanja Modal	39
5.2.2.1	Belanja Tanah	39
5.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39
5.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	39
5.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39
5.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	39
5.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	40
	PENJELASAN POS-POS NERACA	40
5.4	Aset	40
5.4.1	Aset Lancar	40
5.4.2	Investasi Jangka Panjang	40
5.4.3	Aset Tetap	41
5.4.5	Aset Lainnya	44
5.5	Kewajiban dan Ekuitas Dana	45
5.5.1	Kewajiban jangka Pendek	45
5.5.2	Kewajiban Jangka Panjang	45
5.6	Ekuitas	45

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)		
8.	Pendapatan - LO	46
8.1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	46
9	Beban	47
9.1	Beban Operasi	47
	Surplus/defisit operasional	48
8.4	Surplus Non Operasional - LO	48
9.3	Defisit Non Operasional - LO	48
	Surplus/defisit non operasional	48
	Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	48
8.5	Pendapatan luar biasa	49
9.4	Beban Luar Biasa	49
	Surplus/defisit pos luar biasa	49
	Surplus/Defisit LO	49
PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)		
	Ekuitas Awal	49
	Surplus/Defisit LO	49
	Koreksi Menambah/mengurangi Ekuitas	49
	Ekuitas Akhir	49
BAB VI	PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN	50
6.1	Organisasi	50
6.2	Kebijakan	51
6.3	Struktur Kepegawaian / SDM	51
BAB VII	PENUTUP	53

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 disusun guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Disusun berdasarkan standar akuntansi Pemerintahan (SAP), bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib disusun dalam bentuk laporan keuangan Perangkat Daerah yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang berisikan penjelasan antara lain mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang menginformasikan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan, selain itu juga berfungsi membandingkan realisasi belanja sesuai anggaran yang ditetapkan. Membantu dalam menilai kondisi keuangan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelaksanaan realisasi anggaran serta menentukan ketaatan terhadap kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menemukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna antar lain meliputi legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

kinerja perangkat daerah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 perihal Penyajian Laporan Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang;
- j. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
- k. Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;

1. Peraturan Bupati Semarang No.52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sistematika penulisan CALK terdiri dari 6 (enam) bab, antara lain :

Bab I. Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika dari isi CALK.

Bab II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2019.

Bab III. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi menyajikan informasi tentang dasar kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah yang akan diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi penjelasan untuk mengungkapkan informasi di dalam laporan keuangan antara lain yaitu pendapatan, belanja dan penjelasan pos-pos neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Bab VI. Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Antara lain penjelasan mengenai organisasi perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang dan penjelasan atas struktur kepegawaian atau sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJAPERANGKAT DAERAH

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dibidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu dibidang penerimaan pendapatan daerah (*revenue policy*) dan kebijakan dibidang pembelanjaan keuangan daerah (*expenditure policy*), kebijakan tersebut mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah.

a. Pendapatan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang tidak memiliki pemasukan pendapatan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

b. Belanja

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :

- 1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
- 2) Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana;
- 3) Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana;
- 4) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan, termasuk belanja tidak langsung;
- 5) Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak terselesaikan.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Strategi sebagai langkah-langkah yang berisi program-program kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi yaitu peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang profesional dan bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta pelaksanaan pembangunan, daerah dapat lebih efektif dan efisien, maka dijabarkan dalam program-program pembangunan dimana pada masing-masing program/kegiatan ditentukan keluaran/ indikator sasaran yang hendak dicapai berikut pencapaian target kinerja sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pengelolaan surat menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor dan cetak kop surat.	4.500 surat keluar dan 5.500 surat masuk.	100
2	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik.	15 jenis 12 bulan	100
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor.	Perbaikan 12 jenis peralatan kantor dan perbaikan 10 unit mesin absensi.	100
4	Penyediaan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.	Makan minum 52 pegawai.	100
5	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan dan terbayarnya honor bendahara.	12 bendel dokumen SPJ dan 6 org.	100

6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan alat kebersihan kantor dan terbayarnya honor jasa angkut sampah serta retribusi sampah 12 bulan.	28 item alat kebersihan, 1 orang jasa angkut sampah serta retribusi sampah 12 bulan.	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultaasi ke luar daerah	Terlaksananya rakoor dan konsultasi ke Semarang, Jateng/DIY, Jabar/Jatim, DKI Jakarta dan Luar Jawa.	Smg 10 kl, Jateng/DIY 9 kl, Jabar/Jatim 1 kl, Jakarta 9 kl, Luar Jawa 3 kl.	100
8	Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran	Terbayarnya honor cleaning service dan honor instruktur senam.	2 org cleaning, 1 org supir, 1 org penjaga malam dan 33 kali instruktur senam.	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
9	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor	Terlaksananya 1 paket pengadaan peralatan kantor.	4 unit komputer, 5 unit printer dan 1 unit hardisk eksternal.	100
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.	1 paket pemeliharaan pintu dan pengecatan gedung kantor, 1 paket pengerjaan pembuatan papan nama kantor acrylic.	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional.	4 mobil, 11 sepeda motor.	

12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC.	14 unit AC.	
----	---	--------------------------------	-------------	--

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
13	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	104 stel.	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
D	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			
14	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terselesaikannya SK pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Kab.Semarang.	325 SK pensiun.	100
15	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Terlaksananya pemberian uang duka.	26 keluarga PNS.	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
E	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
16	Sosialisasi/bintek peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian	100 PNS dan 600 lbr leafet	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
F	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan bulanan (POK), LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan semesteran dan akhir tahun.	6 dokumen, 42 buku.	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
G	Program Perencanaan			
18	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen Renja, KUA, RKA, DPA dan Progran Kerja.	5 dokumen, 75 buku.	100

Urusan : Wajib Kepegawaian				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
H	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)			
19	Pendidikan penjenjangan struktural	Terkirimnya peserta diklatpim tk II, III dan IV serta terlaksananya penerimaan kegiatan benchmarking ke best practice diklatpim atau OL pemkab/kota atau lembaga diklat daerah lain, terlaksananya evaluasi pasca diklat.	80 pejabat struktural mengikuti diklatpim tk II, III dan IV; 4 kali penerimaan benchmarking/OL; 1 kali pelaksanaan evaluasi pasca diklat.	100
20	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	1) Pengiriman PNS gol.II/d dan III/d mengikuti ujian dinas.	30 PNS ujian dinas dan 70 PNS ujian UKPPI.	100

		2) Pengiriman PNS mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.		
--	--	--	--	--

Urusan : Wajib Kepegawaian				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)			
21	Pendidikan dan Pelatihan Prabatan bagi calon PNS daerah	CPNS golongan II dan III Formasi Umum dan CPNS yang diangkat dari tenaga honorer K2 mengikuti diklat prajabatan/Latsar, serta terlaksananya evaluasi pasca diklat prajabatan/latsar tahun 2018.	346 CPNS Gol. II dan Gol. III Formasi Umum, 17 CPNS honorer K2, 2 kali evaluasi pasca prajab.	100
22	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Terkirimnya PNS mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan.	93 orang.	100

Urusan : Wajib Kepegawaian				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
J	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)			
23	Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui : 1) Promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural.	5 kl pelantikan, 300 SK fungsional, 2 kl seleksi JPT.	100

		<p>2) Pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional.</p> <p>3) Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi.</p>		
24	Seleksi penerimaan calon PNS	Terlaksananya penyerahan SK CPNS umum formasi 2018 sejumlah 351 orang, terlaksananya penyerahan SK CPNS Bidan PTT sejumlah 12 orang, seleksi PPPK tahap I sejumlah 176 orang dan terlaksananya pengadaan ASN sejumlah 500 orang (CPNS dan PPPK).	1039 orang.	100
25	Penempatan PNS	Terlaksananya mutasi pelaksana, mutasi keluar dan mutasi masuk Kab. Semarang dan terlaksananya pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan.	150 SK mutasi dan 20 SK pengangkatan/ pemberhentian.	100
26	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Terprosesnya dan terselesaikannya SK kenaikan pangkat PNS dan terselesaikannya SPTKG PNS Gol.IV.	1050 SK, 1400 SPTKG.	100
27	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya pemberian piagam dan satya lencana.	120 piagam dan satya lencana.	100

28	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya rapat tim penyelesaian kasus.	26 kali rapat.	100
29	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Pemberian bantuan biaya pendidikan S2.	S2 7 orang wisudawan, 3 mahasiswa baru.	100
30	Penyelenggaraan sumpah janji PNS	Berita Acara sumpah janji PNS.	120 cetak Berita Acara sumpah janji PNS.	100
31	Pembinaan Kedisiplinan PNS	Terlaksananya sidak, rapat koordinasi kepegawaian, rakoor pembahasan hasil monev/sidak.	20 kl sidak, 2 kl rakoor, 5 kl monev.	
32	Penyusunan formasi PNS daerah	Tersusunnya buku formasi PNSD Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2018, penetapan kebutuhan CPNS 2018, penetapan kebutuhan PPPK tahap I tahun 2019, penetapan kebutuhan PPPK tahap II 2019, penetapan kebutuhan formasi STTD tahun 2019.	4 buku formasi, 400 formasi, 176 formasi, 100 formasi, 2 orang.	100
33	Manajemen pengelolaan data pegawai	1) Validasi dan entry data kepegawaian 2) Pemeliharaan file/dok pegawai 3) Laporan bulanan berupa mekanisme lap dan peremajaan data pegawai sebanyak 12 kali 4) Pelaporan Harta Kekayaan	8061 data PNS, 363 data CPNS dan data pegawai non ASN pada 46 Perangkat Daerah, 51 SLTP, 19 koordinator wilayah kecamatan Dinas Pendidikan, 27 UPTD Puskesmas, serta 2 UPTD SKB, 8424 file PNS/CPNS, 12 laporan peremajaan data	100

		Penyelenggara Negara terdiri dari pejabat negara, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat fungsional auditor, dan P2UPD 5) Data pegawai non ASN.	pegawai, 193 wajib LHKPN tahun pelaporan 2018	
34	Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas	Terbekalinya PNS yang akan purna tugas.	70 orang, 4 angkatan.	100

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan untuk target sampai dengan 31 Desember 2019 pencapaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang terealisasi sebesar Rp.12.880.053.733,00 (93,03%), bila dibandingkan dengan total anggarannya yaitu sebesar Rp.13.845.774.000,00. Belanja tersebut antara lain terdiri dari realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Apabila dikaitkan dengan belanja tidak langsung (gaji pegawai), dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.641.432.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.509.719.940,00 (97,16%). Apabila dilihat dari program dan kegiatan sesuai bidang kewenangannya, dari anggaran yang tersedia untuk anggaran Belanja Langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp.9.204.342.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.8.370.333.793,00 (90,94%) yang teralokasi untuk 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019.

Berikut Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Pengelolaan surat menyurat	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp.26.500.000,00 Rp. 26.500.000,00 (100,00 %) Rp.0,00 (0,00 %) Terlaksananya surat menyurat kantor dan cetak kop surat 2.432 surat keluar dan 3.137 surat masuk. -
2	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 109.100.000,00 Rp.76.432.033,00 (70,06 %) Rp. 32.667.967,00 (29,94 %) Terbayarnya jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 15 jenis selama 12 bulan. Sisa anggaran karena pembayaran air, listrik dan telepon bergantung pada pemakaian.

3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 40.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 (100,00 %) Rp. 0,00 (0,00 %) Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor 12 jenis peralatan kantor dan perbaikan dan 10 unit mesin absensi. -
4	Penyediaan logistik kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 90.592.000,00 Rp.82.041.000,00 (90,65 %) Rp.8.551.000,00 (9,44 %) Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (makan minum 49 pegawai). Sisa anggaran dari target penyediaan logistik untuk 52 pegawai namun kondisi pada tahun 2019 jumlah pegawai sebanyak 47 orang.
5	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 25.500.000,00 Rp. 23.336.000,00 (91,51 %) Rp. 2.164.000,00 (8,49 %) Tersusunnya 12 dokumen SPJ dan terbayarnya honor bendahara 12 bln sebanyak 5 org. Efisiensi dari anggaran honor, karena ada pembantu bendahara 2 orang ikut pelantikan.
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 8.100.000,00 Rp.8.059.000,00 (99,49%) Rp.41.000,00 (0,51 %) Terbayarnya pengadaan alat kebersihan kantor dan terbayarnya honor jasa angkut sampah serta retribusi sampah 12 bulan (28 item alat kebersihan, 1 orang jasa angkut sampah serta retribusi sampah 12 bulan). Sisa anggaran dari efisiensi pembelian perlengkapan rumah tangga.

7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 141.555.000,00 Rp.141.426.511,00 (99,91 %) Rp.128.489,00 (0,09 %) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Smg 4 kl, Jateng/DIY 11 kl, Jakarta 11 kl, Luar Jawa 6 kl. Sisa anggaran dari tiket transportasi dan hotel (tiket dibayarkan <i>atcost</i>).
8	Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 117.324.000,00 Rp.113.061.352,00 (96,37 %) Rp. 4.262.648,00 (3,63%) Terbayarnya honor outsourcing 2 org 1 org supir, 1 org penjaga malam dan 33 kali instruktur senam. Sisa anggaran karena 1 orang driver baru mulai bekerja pada bulan maret 2019.

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
9	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 60.000.000,00 Rp. 55.984.500,00 (93,31 %) Rp. 4.015.500,00 (6,69 %) Terlaksananya 1 paket pengadaan peralatan kantor 4 unit komputer, 5 unit printer dan 1 unit hardisk eksternal. Sisa anggaran karena efisiensi (harga barang dibawah indeks).
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 70.000.000,00 Rp. 69.442.000,00 (99,20 %) Rp. 558.000,00 (0,80 %) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket pemeliharaan pintu dan pengecatan gedung kantor, 1 paket pengerjaan pembuatan papan nama kantor acrylic.

		Keterangan	Sisa anggaran karena efisiensi (harga paket pekerjaan dibawah pagu anggaran).
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 45.000.000,00 Rp. 38.804.054,00 (86,23 %) Rp.6.195.946,00 (13,77 %) Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 4 mobil dan 11 sepeda motor. Sisa anggaran karena pajak mobil Innova dan Avanza nilainya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya dan efisiensi dari pembelian oli dikarenakan penggantian oli bergantung pada jarak tempuh masing-masing kendaraan (KM).
12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 6.500.000,00 Rp. 6.500.000,00 (100,00%) Rp. 0,00 (0,00%) Terlaksananya pemeliharaan AC sebanyak 14 unit AC. -

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
13	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 20.800.000,00 Rp. 19.600.000,00 (94,23 %) Rp. 1.200.000,00 (5,77 %) Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 98 stel. Sisa anggaran karena target pembelian pakaian dinas untuk 52 pegawai namun kondisi jumlah pegawai pada semester pertama tahun 2019 sebanyak 49 orang (pengadaan pakaian dinas dilaksanakan pada semester pertama).

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
D	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		
14	Pemulangan pegawai yang pensiun	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp.25.000.000,00 Rp.24.875.073,00 (99,50 %) Rp.124.927,00 (0,50 %) Terselesaikannya SK pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Kab.Semarang sebanyak 465 SK. Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas luar daerah.
15	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp.30.730.000,00 Rp.30.600.000,00 (99,58 %) Rp.130.000,00 (0,42 %) Terlaksananya pemberian bantuan pemakaman bagi 28 keluarga PNS. Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
E	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
16	Sosialisasi/bintek peraturan perundang-undangan	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 19.000.000,00 Rp.18.844.143,00 (99,18 %) Rp.155.857,00 (0,82 %) Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian untuk 100 orang PNS dan pembuatan 600 lbr leafet. Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas luar daerah.

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
F	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Target Realisasi	Rp. 9.000.000,00 Rp.8.980.000,00 (99,78 %)

	keuangan SKPD	Sisa Keluaran	Rp.20.000,00 (0,22 %) Tersusunnya laporan bulanan (POK), LAKIP, LKPJ, LPPD, LPJ, Laporan semesteran dan akhir tahun 6 dokumen 42 buku.
		Keterangan	Sisa anggaran dari penghematan belanja makan minum rapat.

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
G	Program Perencanaan		
18	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp.14.500.000,00 Rp.14.498.500,00 (99,99%) Rp.1.500,00 (0,01 %) Tersusunnya dokumen Renja, RKA/RKAS, DPA dan Progran Kerja 5 dokumen (75 buku).
		Keterangan	Sisa anggaran dari penghematan BBM.

Urusan : Wajib Kepegawaian			
No	Program dan Kegiatan		
H	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)		
19	Pendidikan penjenjangan struktural	Target Realisasi Sisa Keluran	Rp. 2.724.667.000,00 Rp.2.689.868.082,00 (98,72 %) Rp. 34.798.918,00 (1,28 %) Terkirimnya peserta diklatpim tk II, III dan IV (79 pejabat struktural) serta terlaksananya penerimaan kegiatan benchmarking ke best practice diklatpim atau OL pemkab/kota atau lembaga diklat daerah lain (4 kali), terlaksananya evaluasi pasca diklat.
		Keterangan	Sisa anggaran karena belanja transportasi dan akomodasi (pihak ketiga) tidak terserap untuk 1 orang pejabat struktural karena telah penuhnya kuota peserta diklatpim BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

20	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp.20.583.000,00 Rp.19.083.000,00 (92,71 %) Rp. 1.500.000,00 (7,29 %)
		Keterangan	1. Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas (32 PNS). 2. Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (53 PNS). Sisa anggaran karena realisasi jumlah peserta ujian kedinasan sesuai usulan dari perangkat daerah lebih sedikit dari penetapan anggaran.

Urusan : Wajib Kepegawaian			
No	Program dan Kegiatan		
H	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)		
18	Pendidikan dan Pelatihan Prabatan bagi calon PNS daerah	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 3.380.845.000,00 Rp. 3.358.160.717,00 (99,33 %) Rp. 22.684.823,00 (0,67 %)
		Keterangan	CPNS golongan II dan III Formasi Umum (346 CPNS) dan CPNS yang diangkat dari tenaga honorer K2 mengikuti diklat prajabatan/Latsar (17 CPNS), serta terlaksananya evaluasi pasca diklat (2 kali). Sisa anggaran dari makan minum rapat untuk kegiatan penyerahan STPP Prajabatan tidak terserap karena STPP masih dalam proses di BSDMD Provinsi Jawa Tengah dan efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah.
19	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 335.000.000,00 Rp.311.865.622,00 (93,09 %) Rp.23.134.378,00 (6,91 %)
		Keterangan	Terkirimnya PNS mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan sebanyak 119 orang. Sisa uang harian dan transport

		diklat teknis dan fungsional serta efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah.
--	--	---

Urusan : Wajib Kepegawaian			
No	Program dan Kegiatan		
I	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)		
20	Pembinaan Karier PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 350.000.000,00 Rp.339.973.406,00 (97,14 %) Rp. 10.026.549,00 (2,86 %) Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui : 1. Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural sebanyak 7 kl pelantikan 2. Terlaksananya pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional sebanyak 501 SK fungsional 3. Terlaksananya Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi sebanyak 4 kl Keterangan Sisa anggaran karena efisiensi dalam penggunaan anggaran.
21	Seleksi penerimaan calon PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 980.532.000,00 Rp.313.063.201,00 (31,93 %) Rp.667.468.799,00 (68,07 %) Terlaksananya penyerahan SK CPNS umum formasi 2018 sejumlah 351 orang, terlaksananya penyerahan SK CPNS Bidang PTT sejumlah 12 orang, seleksi PPPK tahap I sejumlah 176 orang dan pengadaan ASN formasi tahun 2019 sejumlah 500 orang (CPNS dan PPPK). Keterangan Sisa anggaran karena seleksi CPNS Formasi 2019 pada tahap seleksi

			administrasi, ujian CAT SKD dan SKB sampai pada tahap penyerahan SK dilaksanakan pada tahun 2020.
22	Penempatan PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp.30.000.000,00 Rp.28.914.676,00 (96,38 %) Rp.1.085.324,00 (3,62 %) Terlaksananya mutasi pelaksana, mutasi keluar dan mutasi masuk Kab. Semarang dan terlaksananya pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan 40 SK mutasi dan 23 SK pengangkatan/ pemberhentian. Sisa anggaran karena ada keterbatasan personil, maka belum bisa terlaksana sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
23	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 114.514.000,00 Rp.110.499.839,00 (96,5 %) Rp.4.014.161,00 (3,5 %) Terprosesnya dan terselesaikannya SK kenaikan pangkat PNS sebanyak 2.316 orang dan terselesaikannya SPTKG PNS Gol.IV sebanyak 1.769 SPTKG. Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas.
24	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 35.000.000,00 Rp.33.245.765,00 (94,99 %) Rp.1.754.235,00 (5,01 %) Terlaksananya pemberian piagam dan satya lencana sebanyak 150 orang. Sisa anggaran dari penghematan perjalanan dinas.
25	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp.45.000.000,00 Rp.44.120.768,00 (98,05 %) Rp.879.232,00 (1,95 %) Terlaksananya rapat tim penyelesaian kasus sebanyak 26 kali rapat. Sisa anggaran dari penghematan perjalanan dinas.

26	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp.43.000.000,00 Rp. 41.922.837,00 (97,49 %) Rp. 1.077.163,00 (2,51%) Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan S2 sebanyak 5 orang dan 3 mahasiswa baru. Sisa anggaran bantuan wisuda bagi PNS Tugas Belajar S2 tidak terserap karena PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan proses pembelajaran dan mengajukan perpanjangan SK Bupati Tugas Belajar.
	Penyelenggaraan sumpah janji PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 15.000.000,00 Rp. 12.574.000,00 (83,83%) Rp. 2.426.000,00 (16,17%) Berita Acara sumpah janji PNS 108 cetak Berita Acara sumpah janji PNS. Sisa anggaran karena target PNS yang mengikuti sumpah janji sebanyak 120 orang, namun realisasinya jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji sebanyak 108 orang.
27	Pembinaan kedisiplinan PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 16.000.000,00 Rp. 15.609.000,00 (97,56 %) Rp. 391.000,00 (2,44 %) Terlaksananya sidak 19 kali, rapat koordinasi kepegawaian 2 kali, rakoor pembahasan hasil monev/sidak 4 kali. Sisa anggaran karena penghematan BBM dan perjalanan dinas.
28	Penyusunan formasi PNS daerah	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 30.000.000,00 Rp. 29.944.737,00 (99,82 %) Rp. 55.263,00 (0,18 %) Tersusunnya buku formasi PNSD Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 (4 buku formasi), penetapan kebutuhan CPNS 2018 (400 formasi), penetapan

		Keterangan	kebutuhan PPPK tahap I tahun 2019 (176 formasi), penetapan kebutuhan PPPK tahap II 2019 (100 orang), penetapan kebutuhan formasi STTD tahun 2019 (2 orang). Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas.
29	Manajemen pengelolaan data pegawai	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 75.000.000,00 Rp. 73.488.417,00 (97,98 %) Rp. 1.511.583,00 (2,02 %) 1. Validasi dan entry data kepegawaian 8097 data PNS/CPNS dan data pegawai non ASN 2. Pemeliharaan file/dok pegawai 8097 data PNS/CPNS 3. Laporan bulanan berupa mekanisme lap dan peremajaan data pegawai 12 laporan bulanan 4. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terdiri dari pejabat negara, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat fungsional auditor, dan P2UPD (187 wajib LHKPN tahun pelaporan 2018) 5. Data pegawai non ASN 4047 data.
		Keterangan	Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas.
30	Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 150.000.000,00 Rp. 149.015.560,00 (99,34 %) Rp. 984.440,00 (0,66 %) Terbekalinya PNS yang akan purna tugas sebanyak 70 orang 4 angkatan.
		Keterangan	Sisa anggaran dari penghematan perjalanan dinas luar daerah.

3.1 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan target sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.8.370.333.793,00 (90,94%), apabila dibandingkan dengan total anggarannya yaitu sebesar Rp.9.204.342.000,00. Walaupun demikian dalam pencapaian target masih

terdapat kendala yang dihadapi sehingga ada beberapa kegiatan yang pencapaian realisasi target tidak maksimal, hambatan tersebut antara lain :

Permasalahan yang dihadapi dibidang kepegawaian di Kabupaten Semarang berikut solusi yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan.
2. Penyusunan kebutuhan SDM melalui penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang disusun oleh SKPD belum sesuai dengan ANJAB ABK.
3. Penempatan ASN yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Semarang belum ada seleksi, sehingga belum mendapatkan SDM yang berkualitas.
4. - Pengajuan usul kenaikan pangkat tidak tepat waktu dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan belum semua persyaratan dipenuhi.
- Pengajuan usul Penerbitan Surat tentang Kenaikan Gaji (SPTKG/KGB) banyak yang terlambat, sehingga sering terjadi pengajuan rapel gaji dan sering terjadi pemalsuan.
5. Pengusulan pensiun banyak yang terlalu mepet dengan batas waktu (TMT).
6. Kurangnya sarana dan prasarana kantor, yakni meliputi perlengkapan dan peralatan kantor serta gedung kantor seperti komputer, laptop, printer dan kelengkapannya meja, kursi rapat, meja kursi pelayanan, meja kursi staf, sound system, LCD proyektor, CCTV, Genset, almari file dsb.
7. Belum selesainya pengelolaan dokumen file kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten Semarang yang ada di BKD.
8. Belum adanya kesesuaian data pegawai dalam e-personal di BKD dengan data penggajian di BKUD serta data e-personal dengan data di SAPK BKN.
9. Data pegawai di e-personal belum dimaksimalkan dalam pelayanan kepegawaian di BKD Kabupaten Semarang.
10. Pelaksanaan diklat kepegawaian pola baru berdasarkan Perka LAN No. 11, 12 dan 13 tahun 2014, terdapat beberapa perubahan kurikulum antara lain pelaksanaan diklat melalui tahapan off campus dan on campus serta diwajibkan seorang peserta diklatpim untuk dapat membuat proyek perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Saat ini pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi memberlakukan persyaratan izin belajar dan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Gubernur dimana peraturan tersebut berbeda

antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini didukung oleh banyaknya permasalahan izin belajar bagi CPNS yang diangkat dari tenaga honorer K1/K2.

12. Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif sehingga pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai mutlak diperlukan. Pengembangan kompetensi ASN diperlukan mengingat tuntutan lingkungan strategis, seperti pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

b. Solusi

Solusi yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan penataan ulang penempatan PNS, khususnya yang belum selesai antara jabatan dengan kompetensi.
2. Usulan persediaan anggaran agar bisa disesuaikan kebutuhan sesuai formasi dari Kemenpan-RB.
3. Agar diusulkan anggaran dalam rangka untuk uji kompetensi mutasi masuk.
4.
 - Sudah membuat jadwal lebih awal dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Membuat buku penjagaan supaya tertib administrasi.
 - Sudah membuat aplikasi e-KGB online sehingga tidak ada pemalsuan karena ada barcode dan sudah online.
5. Usulan paling lambat 1 tahun sebelum TMT, minimal 6 bulan sebelum TMT.
6. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelayanan kepegawaian yang optimal.
7. Fasilitasi pendampingan penataan dokumen kepegawaian oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
8. Sinkronasi data pegawai setiap bulan.
9. Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dengan e-personal secara bertahap.
10. Pembuatan proyek perubahan memberikan tantangan tersendiri bagi peserta diklat, baik dari segi pembiayaan maupun materi dan proses pelaksanaan perubahan, terkait dengan hal tersebut agar pimpinan SKPD maupun segenap PNS dapat mendukung pelaksanaan proyek perubahan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
11. Dengan workshop diharapkan dapat tersusun peraturan izin belajar dan tugas

belajar yang dapat mengakomodir peningkatan SDM melalui jenjang pendidikan formal serta kebutuhan formasi PNS.

12. Presentase anggaran kebutuhan pengembangan kompetensi yang tersedia di BKD masih sangat terbatas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 1 perihal Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah, Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang.

Untuk penyajian neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca awal terdahulu yaitu per 01 Januari 2004 pelaporan aset/kekayaan milik dan atau dikuasai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian harga pasar yang dilakukan oleh konsultan appraisal pihak ketiga PT Survindo Putra Pratama (sesuai kontrak Nomor 050/01972/2003 tanggal 14 Mei 2003), sedangkan mutasi sesudahnya berdasarkan berdasarkan nilai perolehan.

Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan iktisar pemakaian sumber daya ekonomi berdasarkan realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan verifikasi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi:

1. Akuntansi Belanja
2. Persediaan
3. Kewajiban

4. Koreksi Kesalahan
5. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

1. Akuntansi Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawabn atas pengeluaran tersesbut disahkan oleh pengguna anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja bunga;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah;
- e. belanja bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
- g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
dan
- h. belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kepegiatan operasional Pemerintah Daerah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Pengukuran persediaan disajikan sebesar

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c. serta nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi/
rampasan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual/buku. Seluruh mutasi persediaan baik masuk maupun keluar serta saldo persediaan dicatat dalam pembukuan. Mutasi keluar-masuk barang dan pencatatannya menggunakan metode FIFO (First In First Out). Dengan metode ini barang yang dikeluarkan adalah barang yang lebih dahulu masuk, sehingga saldo persediaan adalah barang-barang persediaan yang berasal dari pembelian yang termuda/terakhir. Setiap jenis barang dibuatkan kartu persediaan. Setiap penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang dicatat ke dalam kartu barang menurut jenisnya. Selanjutnya rekapitulasi mutasi dan saldo barang persediaan dicatat dalam buku persediaan. Setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan dan buku persediaan sehingga saldo/jumlah persediaan dapat diketahui sewaktu-waktu. Stock opname secara berkala terhadap barang persediaan yang ada untuk dicocokkan dengan saldo / jumlah barang persediaan yang ada di buku persediaan.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika semua kewajiban dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika semua kewajiban dibayar lebih dari 12 bulan.
- c. Pada akhir periode pelaporan, saldo pengutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicata pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4. Koreksi Kesalahan

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- b. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (dengan PERDA), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
- c. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

5. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus :

- a. Mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap yang sudah ditetapkan

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan karena pengadaan aset tetap (pembelian, hibah, donasi, pertukaran, dan lain-lain perolehan yang sah baik yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kedokteran</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat keamanan</i>	$\geq 300.000,-$
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	Seluruhnya
	<i>Bangunan monumen</i>	Seluruhnya
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	Seluruhnya
	<i>Jembatan</i>	Seluruhnya
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	Seluruhnya
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	Seluruhnya

5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat persenjataan</i>	$\geq 300.000,-$
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas, ditambah atau diperbesar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga per Unit (RP)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kedokteran</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat keamanan</i>	$\geq 300.000,-$
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Bangunan monumen</i>	<i>Seluruhnya</i>
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Jembatan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	<i>Seluruhnya</i>
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	<i>Nihil</i>
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat persenjataan</i>	$\geq 300.000,-$
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meningkatnya efisiensi dan atau menurunnya biaya pengoperasian aktiva tetap, ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah harga per unit (RP)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	$\geq 10.000.000,-$
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	$\geq 10.000.000,-$
	- roda empat	$\geq 2.000.000,-$
	- roda dua	$\geq 2.000.000,-$
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	$\geq 1.500.000,-$
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	$\geq 1.500.000,-$
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat-alat kedokteran</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat keamanan</i>	$\geq 1.000.000,-$
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Bangunan monumen</i>	$\geq 100.000.000,-$
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Jembatan</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	$\geq 100.000.000,-$
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	<i>Tidak dikapitalisasi</i>
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	<i>Tidak Dikapitalisasi</i>
	<i>Alat persenjataan</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Aktiva tak berwujud</i>	$\geq 1.000.000,-$

Aset tetap diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dan telah diverifikasi dalam periode berkenaan.

Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan Aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang bersangkutan.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Tanah

Aset tanah yang disajikan dalam neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan baik berasal dari perolehan hak, ataupun yang berasal dari instansi vertikal, dilaporkan berdasarkan posisi aset yang dimiliki.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya/ keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi, yang dilaporkan berdasarkan posisi aset yang dimiliki. Dengan nilai perolehan diatas Rp. 300.000,00 sebagai penambah aset tetap neraca.

4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan aset buku/aset tetap lainnya yang disajikan berdasarkan nilai perolehan wajar aset/barang, termasuk yang nilai perolehannya dibawah Rp 300.000,00.

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya yaitu aset tak berwujud berupa aset software/ program aplikasi yang disajikan merupakan tambahan mutasi berdasarkan realisasi anggaran belanja modal yang dapat diinventarisasi dan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

TABEL Tarif Penyusutan Untuk Setiap Asset :

No	Uraian	Tarif Penyusutan (%)
1	Tanah	0%
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	5%
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	5%
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	4%
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	5%
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	5%
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	5%

	<i>Alat-alat kedokteran</i>	8%
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	8%
	<i>Alat keamanan</i>	5%
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	4%
	<i>Bangunan monumen</i>	4%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	4%
	<i>Jembatan</i>	4%
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	8%
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	4%
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	8%
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	8%
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	0%
	<i>Alat persenjataan</i>	5%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0%

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1 PENDAPATAN **Rp 0,00**

Tidak ada realisasi pendapatan ditahun 2019, karena Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki pendapatan daerah.

5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tidak ada realisasi pendapatan asli daerah ditahun 2019, karena Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki pendapatan asli daerah.

Pendapatan	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-

5.2 BELANJA **Rp 12.823.322.233,00**

Belanja yang direalisasikan Badan kepegawaian Daerah Kab.Semarang tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 12.823.322.233,00 antara lain terdiri dari belanja operasi yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Penjelasan mengenai pos-pos belanja pada tahun anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	4.739.010.000,00	4.570.171.940,00	4.231.877.764,00
Belanja Barang/Jasa	9.045.976.000,00	8.253.150.293,00	3.149.578.919,00
Jumlah	13.784.986.000,00	12.823.322.233,00	7.381.456.683,00

Realisasi belanja operasi untuk tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp.12.823.322.233,00 (93,02%) dari jumlah anggarannya sebesar Rp.13.784.986.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran ditahun 2018 mengalami kenaikan realisasi belanja operasi sebesar Rp. 5.441.865.550,00.

5.2.1.1 Belanja Pegawai**Rp 4.570.171.940,00**

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 4.570.171.940,00 terdiri dari belanja tidak langsung (gaji & tunjangan pegawai) dan belanja langsung (belanja pegawai).

Rincian realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung :

a. Gaji dan Tunjangan	Rp	2.969.643.690,00
b. Tambahan Pengh. PNS	Rp	1.540.076.250,00
	Rp	4.509.719.940,00

Belanja Langsung :

a. Honorarium PNS	Rp	9.900.000,00
b. Uang Lembur	Rp	50.552.000,00
	Rp	60.452.000,00

5.2.1.2 Belanja Barang / Jasa**Rp 8.253.150.293,00**

Jumlah realisasi Belanja
Barang / Jasa terdiri dari :

a. Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	156.400.898,00
b. Belanja Bahan/Material	Rp	21.108.000,00
c. Belanja Jasa Kantor	Rp	1.231.882.033,00
d. Belanja Premi Asuransi	Rp	3.346.352,00
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp	38.804.054,00
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	111.059.000,00
g. Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	Rp	8.384.000,00
h. Sewa sarana mobilitas	Rp	41.500.000,00
i. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp	5.280.000,00
j. Belanja Makanan Dan Minuman	Rp	223.214.000,00
k. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp	19.600.000,00
l. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	929.789.956,00
m. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp	33.375.000,00
n. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp	5.098.915.000,00
o. Belanja Pemulangan Pegawai	Rp	28.000.000,00
p. Belanja Pemeliharaan	Rp	115.942.000,00
q. Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli/Instruktur	Rp	186.550.000,00

5.2.2 BELANJA MODAL **Rp 56.731.500,00**

Belanja Modal	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	60.788.000,00	56.731.500,00	0,00
Belanja Gedung dan bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah			

Realisasi belanja modal sebesar Rp. 56.731.500,00 berasal dari belanja peralatan dan mesin. Rincian realisasi belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.2.1 Belanja Tanah **Rp 0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Tanah

5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin **Rp 56.731.500,00**
Jumlah realisasi Belanja Modal terdiri dari :

a. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp	747.000,00
b. Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp	55.984.500,00

5.2.2.3 Belanja Gedung dan Bagunan **Rp 0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

5.2.2.4 Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp 0,00**
Tidak ada realisasi Belanja jalan, irigasi dan jaringan

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp 0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

5.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Rp

0,00

Tidak ada realisasi Belanja
Aset Tetap Lainnya

PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4	ASET	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	3.171.328.688,00	Rp	3.212.657.312,00

Total aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.171.328.688,00 nilai total aset turun sebesar Rp.41.328.624,00 (1,30%) dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2018.

5.4.1	ASET LANCAR	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	1.887.750,00	Rp	1.442.100,00

Jumlah aset lancar yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.887.750,00 jumlah tersebut naik sebesar Rp.445.650,00 (30,90%) dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2018. Aset lancar yang dimiliki tersebut adalah aset lancar berupa persediaan. Rincian dari aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.1	Kas	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	0,00	Rp	0,00

Jumlah kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00 jumlah tersebut adalah saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Semarang. Seluruh sisa kas pada akhir Desember 2019 telah disetorkan ke Kas Daerah.

5.4.1.2	Persediaan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	1.887.750,00	Rp	1.442.100,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan Perangkat Daerah. Nilai persediaan yang dimiliki diperoleh dari hasil perhitungan fisik keseluruhan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.887.750,00. Jumlah tersebut adalah saldo akhir persediaan bahan pakai habis yang berupa persediaan alat tulis kantor & persediaan barang cetakan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2019 (untuk rinciannya dapat di lihat di lampiran daftar persediaan). Nilai persediaan 2019 naik dibandingkan dengan nilai persediaan tahun anggaran 2018.

5.4.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	0,00	Rp	0,00

Jumlah investasi jangka panjang yang dimiliki per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00 karena Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tidak memiliki aset berupa investasi jangka panjang.

5.4.3	ASET TETAP	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	3.087.156.738,00	Rp	3.115.830.412,00

Total aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.087.156.738,00 turun sebesar Rp. 28.673.674,00 (0,92%) dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2018. Penjelasan rincian penurunan total aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.3.1	Tanah	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	664.800.000,00	Rp	664.800.000,00

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap tanah yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab. Semarang sampai dengan akhir bulan Desember 2019, sehingga nilai tanah per 31 Desember 2019 tetap sebesar Rp.664.800.000,00.

5.4.3.2	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Rp	2.631.928.916,00	Rp	2.345.715.416,00

Nilai aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.286.213.500,00. Penambahan ini berasal dari mutasi masuk alat angkutan darat bermotor dari BKUD, yaitu kendaraan roda 4 (empat) dengan nilai aset sebesar Rp.229.482.000,00 (berdasarkan BA.Nomor:030/75/2019, tanggal 12 Desember 2019) dan penambahan dari pengadaan alat rumah tangga sebesar Rp.747.000,00 dan pengadaan komputer sebesar Rp.55.984.500,00. Perincian pemanfaatan nilai aset tetap peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Saldo Awal 2018 (Rp)	Mutasi Tambah /Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2019 (Rp)
Alat-alat Bantu	360.000,00	0,00	360.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	853.743.856,00	229.482.000,00	1.083.225.856,00
Alat Kantor	435.049.000,00	*) 138.940.000,00	573.989.000,00
Alat Rumah Tangga	414.794.560,00	747.000,00 *) (65.350.000,00)	350.191.560,00
Komputer	522.065.500,00	55.984.500,00 *) (900.000,00)	577.150.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.387.500,00	0,00	29.387.500,00
Alat Studio	77.865.000,00	*) (71.490.000,00)	6.375.000,00

Alat Komunikasi	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.200.000,00	*) (1.200.000,00)	0,00
Jumlah	2.345.715.416,00	286.213.500,00	2.631.928.916,00

Nb. *) Penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin disebabkan karena adanya penyesuaian kelompok aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2019, sehingga terjadi penambahan maupun pengurangan kelompok aset tersebut.

5.4.3.3 Gedung & Bangunan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Rp	2.036.534.140,00	Rp	2.036.534.140,00

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang sampai bulan desember 2019, tidak ada penambahan maupun pengurangan aset, sehingga nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 tetap sebesar Rp.2.036.534.140,00 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Kelompok Pemanfaatan Bangunan	Saldo Awal 2018 (Rp)	MUTASI Tambah/Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2019 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor	1.687.870.000,00	0,00	1.687.870.000,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	24.435.840,00	0,00	24.435.840,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	324.228.300,00	0,00	324.228.300,00
Jumlah	2.036.534.140,00	0,00	2.036.534.140,00

5.4.3.4 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Rp	26.565.860,00	Rp	26.565.860,00

Nilai aset tetap lainnya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang berupa buku peraturan perundang-undangan. Sampai akhir bulan Desember 2019 tidak ada penambahan maupun pengurangan aset, sehingga nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.26.565.860,00 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	MUTASI Tambah/Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2019 (Rp)
Umum	14.059.260,00	0,00	14.059.260,00
Ilmu Sosial	12.506.600,00	0,00	12.506.600,00
Jumlah	26.565.860,00	0,00	26.565.860,00

5.4.3.5 Akm Penyusutan

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Rp	(2.272.672.178,00)	Rp	(1.957.785.004,00)

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tahun 2019 bertambah sebesar Rp. 314.887.174,00 (16,08%) dibandingkan tahun 2018. Sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 naik menjadi Rp.2.272.672.178,00 dengan perincian akumulasi penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Uraian	Akm Penyusutan 2018 (Rp)	MUTASI (Tambah)/ Kurang (Rp)	Akm Penyusutan 2019 (Rp)
Tanah	(0,00)		(0,00)
Peralatan dan Mesin	(973.456.268,00)	(231.498.373,00)	(1.204.954.641,00)
Alat-alat bantu	(300.000,00)	(20.000,00)	(320.000,00)
Alat Angkutan darat	(356.852.864,00)	(157.607.359,00)	(514.460.223,00)
Alat Kantor	(97.104.350,00)	(27.001.550,00) *) (82.261.000,00)	(206.366.900,00)
Alat Rumah Tangga	(213.134.329,00)	(17.083.995,00) *) 39.202.500,00	(191.015.824,00)
Peralatan Komputer	(231.438.308,00)	(27.503.108,00) *) 585.000,00	(258.356.416,00)
Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat	(17.906.667,00)	(1.491.111,00)	(19.397.778,00)
Alat Studio	(46.204.750,00)	(206.250,00) *) 41.273.500,00	(5.137.500,00)
Alat Komunikasi	(9.315.000,00)	(585.000,00)	(9.900.000,00)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	(1.200.000,00)	*) 1.200.000,00	(0,00)
Gedung dan Bangunan	(960.761.276,00)	(82.011.172,00)	(1.042.772.448,00)
Gedung dan Bangunan	(960.761.276,00)	(82.011.172,00)	(1.042.772.448,00)
Aset Tetap Lainnya	(23.567.460,00)	(1.377.629,00)	(24.945.089,00)
Buku	(23.567.460,00)	(1.377.629,00)	(24.945.089,00)
Jumlah	(1.957.785.004,00)	(314.887.174,00)	(2.272.672.178,00)

Penambahan maupun pengurangan akumulasi aset tetap dapat dijelaskan sbb :

- Apabila dilihat dari penambahan akumulasi penyusutan alat angkutan sebesar Rp.157.607.359,00 nilainya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal tersebut karena adanya mutasi masuk akumulasi penyusutan Th.2019 yang berasal dari kendaraan bermotor roda 4 (empat) BKUD Kab. Semarang sebesar Rp.114.741.000,00.

- Penambahan akumulasi aset tetap masing-masing kelompok berasal dari penambahan beban penyusutan di tahun 2019.
- *) Penambahan dan pengurangan akumulasi aset tetap peralatan dan mesin disebabkan karena adanya penyesuaian kelompok aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2019, sehingga terjadi penambahan maupun pengurangan kelompok aset tersebut.

5.4.4 ASET LAINNYA

31Desember2019		31 Desember 2018	
Rp	82.284.200,00	Rp	95.384.800,00

Aset lainnya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 82.284.200,00 apabila dibandingkan dengan saldo aset lainnya per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.13.100.600,00 (turun 13,73%). Penjelasan dari rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.4.1 Aset Tak Berwujud Lainnya

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Rp	131.006.000,00	Rp	131.006.000,00

Nilai aset lainnya berupa aset tidak berwujud sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.131.006.000,00 jumlah tersebut adalah aplikasi kepegawaian (software). Apabila dibandingkan dengan aset tak berwujud pada tahun 2018 nilainya tetap karena pada tahun 2019 tidak ada penambahan maupun pengurangan aset tak berwujud lainnya. Rincian pemanfaatan aset tak berwujud lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	Saldo Awal 2018 (Rp)	MUTASI Tambah (Kurang)	Saldo Akhir 2019 (Rp)
E-Jab Fungsional	0,00	0,00	0,00
E-Mutasi	0,00	0,00	0,00
E-Profil Pegawai	0,00	0,00	0,00
E-Struktural Jabatan	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Data PTT	0,00	0,00	0,00
E-Personal	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00
E-File	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
E-Kinerja	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Absensi & Jaringan	36.806.000,00	0,00	36.806.000,00
Jumlah	131.006.000,00	0,00	131.006.000,00

5.4.4.2 Akm. Amortisasi

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Rp	48.721.800,00	Rp	35.621.200,00

Nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang berupa aplikasi kepegawaian memiliki saldo per 31 Desember 2019 naik sebesar Rp.13.100.600,00 (36,77%), sehingga nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya per 31 Desember 2019 menjadi Rp.48.721.200,00 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Uraian	Akm Penyusutan 2018 (Rp)	MUTASI Tambah/Kurang (Rp)	Akm Penyusutan 2019 (Rp)
Software	(35.621.200,00)	(13.100.600,00)	(48.721.800,00)
Jumlah	(35.621.200,00)	(13.100.600,00)	(48.721.800,00)

5.5 KEWAJIBAN & EKUITAS DANA

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Rp		Rp	
	3.171.328.688,00		3.212.657.312,00

5.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Rp		Rp	
	0,00		0,00

Jumlah kewajiban jangka pendek yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 karena Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tidak memiliki kewajiban jangka pendek.

5.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Rp		Rp	
	0,00		0,00

Jumlah kewajiban jangka panjang yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 karena Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

5.6 EKUITAS

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Rp		Rp	
	3.171.328.688,00		3.212.657.312,00

Terdapat pengurangan nilai ekuitas yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar Rp. 41.328.624,00 sehingga nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp.3.171.328.688,00 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2018 (Rp)	MUTASI Tambah (Kurang)	Saldo Akhir 2019 (Rp)
Ekuitas	3.212.657.312,00	41.328.624,00	3.171.328.688,00
Jumlah	3.212.657.312,00	41.328.624,00	3.171.328.688,00

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Defisit LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 13.036.123.357,00 apabila dibandingkan dengan Defisit LO per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.437.750.485,50 (71,56%). Penjelasan rincian kenaikan Defisit LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nomor Urut	Uraian	Saldo 2019 (Rupiah)	Saldo 2018 (Rupiah)
1	2	3	4
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00
	<i>Tidak ada realisasi pendapatan</i>		
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	0,00	0,00
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO		
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO		
8.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO		
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00
8.2.1.	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
8.2.1.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		
8.2.1.02	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LO		
8.2.1.03	Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO		
8.2.1.04	Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO		
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus - LO		
8.2.2.02	Dana Penyesuaian - LO		

8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil lainnya - LO		
8.2.3.03	Pendapatan dana otonomi khusus lainnya - LO		
8.2.4	Bantuan Keuangan LO	0,00	0,00
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari pemda Provinsi lainnya - LO		
8.2.4.02	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Kabupaten - LO		
8.2.4.03	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Kota - LRA		
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO		
8.3.2	Pendapatan Dana Darurat - LO		
8.3.3	Pendapatan lainnya- LO		
	Jumlah Pendapatan- LO	0,00	0,00
9	BEBAN	13.036.123.357,00	7.598.372.871,50
9.1	BEBAN OPERASI	13.036.123.357,00	7.598.372.871,50
9.1.1.	Beban Pegawai	4.570.171.940,00	4.327.362.764,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	8.252.704.643,00	3.055.379.719,00
9.1.3.	Beban Bunga		
9.1.4	Beban Subsidi		
9.1.5	Beban Hibah		

9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	213.246.774,00	215.630.388,50
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang		
9.1.9	Beban lain-lain		
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
9.2.1.	Beban transfer bagi hasil pajak daerah		
9.2.2.	Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya		
9.2.3	Beban transfer bantuan keuangan ke pemda lainnya		
9.2.4	Beban transfer bantuan keuangan ke desa		
9.2.5	Beban transfer bantuan keuangan lainnya		
9.2.6	beban tranfer dana otonomi khusus		
	Jumlah Beban	13.036.123.357,00	7.598.372.871,50
	Surplus/ (Defisit) dari operasi	(13.036.123.357,00)	(7.598.372.871,50)
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8.4.1	Surplus penjualan aset non lancar - LO		
8.4.2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang - LO		
8.4.3	Surplus dari kegiatan Non Opearsional lainnya		
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00
9.3.1	Defisit penjualan aset non lancar		
9.3.2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang		
9.3.3	Defisit dari kegiatan non operasional		

	SURPULS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0,00	0,00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Pos luar biasa		
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa		
	surplus/defisit pos luar biasa	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT LO	(13.036.123.357,00)	(7.598.372.871,50)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.171.328.688,00 apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.41.328.624,00 (1,30%). Penjelasan rincian penurunan Ekuitas Akhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 2019(Rupiah)	Saldo 2018(Rupiah)
2	3	4
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
EKUITAS AWAL	(22.955.201.230,00)	(15.356.828.358,50)
SURPLUS/DEFISIT LO	(13.036.123.357,00)	(7.598.372.871,50)
RK PPKD	39.162.653.275,00	26.167.858.542,00
EKUITAS AKHIR	3.171.328.688,00	3.212.657.312,00

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

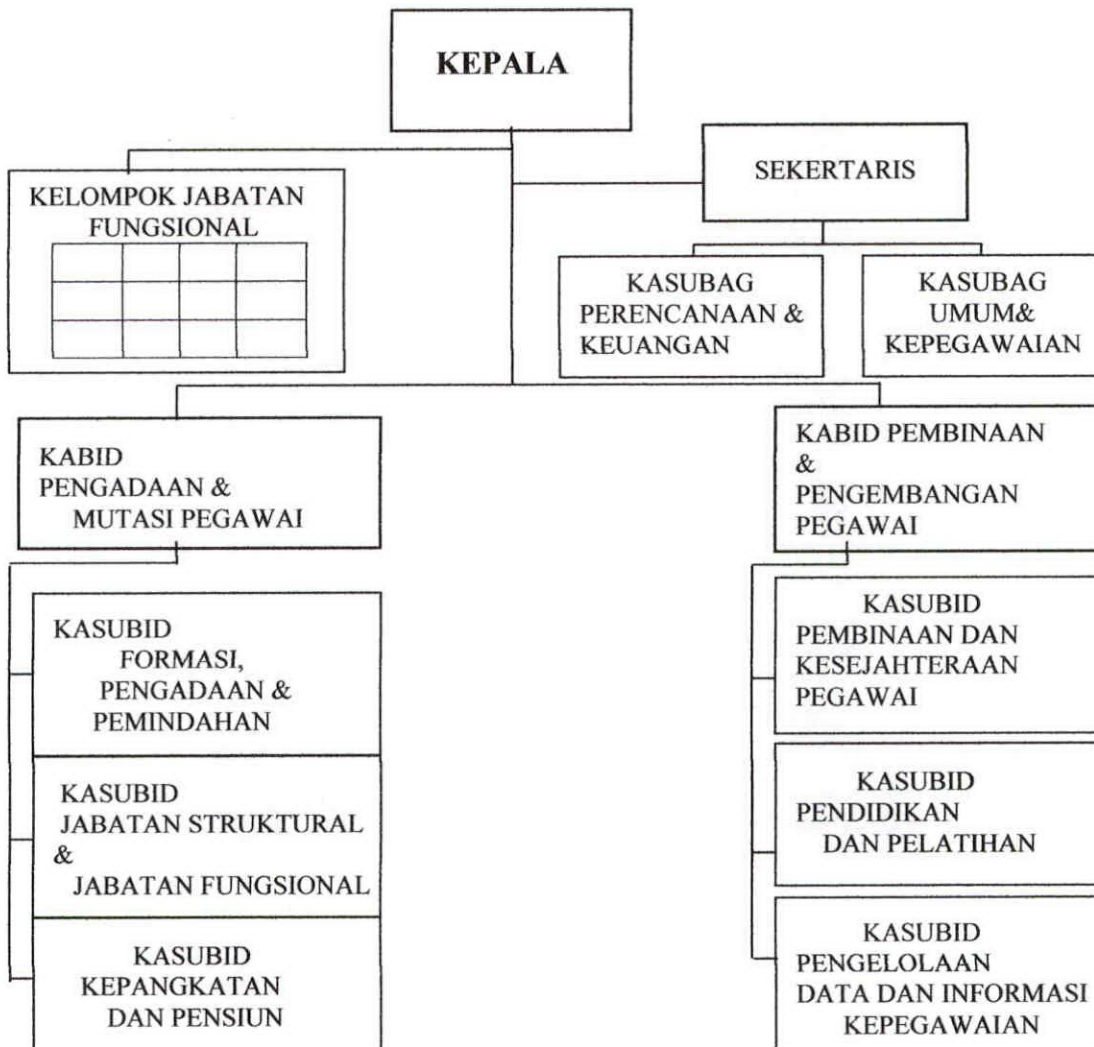
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Peranngkat Daerah Kabupaten Semarang.

Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Lampiran XXIII Peraturan Bupati Semarang.

Nomor : 52 Th. 2016



6.2 Kebijakan

6.2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang No.52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. SOTK Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

6.2.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mempunyai fungsi :

- Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian berdasarkan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
- Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- Penyiapan dan pelaksanaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah berdasarkan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan ;
- Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional berdasarkan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan ;

6.3 Struktur Kepegawaian / SDM

Untuk menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Finansial, maupun prasarana dan sarana.

Dalam mengembangkan tugas pembangunan dibidang aparatur pemerintah (ASN) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang memiliki power Sumber Daya Manusia sebanyak 45 orang personil/pegawai yang meliputi 12 pejabat struktural, 10 staf fungsional, 23 staf umum dan 4 orang Non PNS. Dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------|
| a. Eselon II B | : 1 orang |
| b. Eselon III A | : 1 orang |
| c. Eselon III B | : 2 orang |
| d. Eselon IV A | : 8 orang |
| e. Staf Fungsional | : 10 orang |
| f. Staf Umum | : 23 orang |
| g. Non PNS | : 4 orang |

**Tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS
per 31 Desember 2019**

Golongan	ESELON				NON ESELON		Total
	II	III	IV	V	Fungsional	Staf	
IV/e	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	1	-	-	-	-	-	1
IV/b	-	1	-	-	-	-	1
IV/a	-	2	3	-	2	-	7
Jumlah	1	3	3	-	2	-	9
III/d	-	-	5	-	2	3	10
III/c	-	-	-	-	2	3	5
III/b	-	-	-	-	3	6	9
III/a	-	-	-	-	1	6	7
Jumlah	-	-	5	-	8	18	31
II/d	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	2	2
II/b	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah	-	-	-	-	-	3	3
I/d	-	-	-	-	-	2	2
I/c	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	2	2
TOTAL PNS	1	3	8	-	10	23	45
Non PNS							
Outsourcing	-	-	-	-	-	-	2
Penjaga Malam	-	-	-	-	-	-	1
Supir	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL Non PNS	-	-	-	-	-	-	4
TOTAL PEGAWAI	1	3	8	-	10	22	49

BAB VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 ini dibuat sebagai salah satu bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan di Perangkat Daerah, selain laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang wajib dibuat selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian akan dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hasil penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang, berikut ini akan dijelaskan secara garis besar isi dari laporan keuangan sebagai berikut :

A. Pencapaian Realisasi Belanja

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.739.010.000,00	4.570.171.940,00	96,44
Belanja Barang & Jasa	9.045.976.000,00	8.253.150.293,00	91,24
Belanja Modal	60.788.000,00	56.731.500,00	93,33
Jumlah	13.845.774.000,00	12.880.053.733,00	93,03

Secara keseluruhan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 dapat terealisasi sebesar Rp.12.880.053.733,00 (93,03%) dibandingkan anggarannya sebesar Rp.13.845.774.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.4.570.171.940,00, belanja barang&jasa sebesar Rp. 8.253.150.293,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 56.731.500,00.

B. Pencapaian Realisasi Program

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	558.671.000,00	510.855.896,00	91,44
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	181.500.000,00	170.730.554,00	94,07
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.800.000,00	19.600.000,00	94,23

	Disiplin Aparatur			
D	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	55.730.000,00	55.475.073,00	99,54
E	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.000.000,00	18.844.143,00	99,18
F	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.000.000,00	8.980.000,00	99,78
G	Program Perencanaan	14.500.000,00	14.498.500,00	99,99
H	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)	2.745.250.000,00	2.708.951.082,00	98,68
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)	3.715.845.000,00	3.670.026.339,00	98,77
J	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)	1.884.046.000,00	1.192.372.206,00	63,29
Jumlah		9.204.342.000,00	8.370.333.793,00	90,94

Bila dikaitkan dengan program dan kegiatan sesuai bidang kewenangannya, anggaran yang tersedia untuk belanja langsung tahun anggaran 2019 sejumlah Rp.9.204.342.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.8.370.333.793,00(90,94%) yang teralokasi pada 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan.

C. Posisi Neraca

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset :		
Aset Lancar	1.887.750,00	1.422.100,00
Aset Tetap	3.087.156.738,00	3.115.830.412,00
Aset Lainnya	82.284.200,00	95.384.800,00
Jumlah Aset	3.171.328.688,00	3.212.657.312,00
Ekuitas :		
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas Dana	3.171.328.688,00	3.212.657.312,00
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana	3.171.328.688,00	3.212.657.312,00

Jumlah Aset yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 3.171.328.688,00, Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 41.328.624,00 (1,30%) dibandingkan dengan posisi aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.212.657.312,00. Penurunan jumlah aset tersebut disebabkan karena adanya penyusutan aset tetap di tahun 2019.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat, yang berisi penjelasan atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2019. Dengan laporan keuangan ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada tahun anggaran yang akan datang.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



PARTONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602221992031007